



Kemiskinan Ekstrem DIY Capai 2,41 Persen

Angka kemiskinan ekstrem di DIY itu masih berada di atas angka nasional.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Angka kemiskinan ekstrem di DIY masih berada di atas angka nasional. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan, kemiskinan ekstrem secara nasional berada di angka 2,14 persen pada 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Angka kemiskinan ekstrem ini turun menjadi 2,04 persen di 2022. Namun, posisi kemiskinan ekstrem di DIY masih berada di atas angka nasional yakni 2,41 persen.

"Beberapa tahun terakhir, Presiden (Jokowi) menginginkan agar kita makin memperkuat kebijakan kemiskinan, terutama untuk menghapus kemiskinan ekstrem," kata Pungky dalam acara Forum Pembangunan Daerah yang digelar The SMERU Research Institute bersama

Pemda DIY, Senin (8/8).

Pungky menyebut, penurunan angka kemiskinan lebih banyak kepada perubahan konversi cara menghitungnya yakni angka *purchasing power parity* (PPP) yang diubah karena perkembangan ekonomi dunia. Meski begitu, katanya, perubahan konversi tersebut belum mencerminkan usaha dari penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan.

"Dari perkembangan ini memang angka (kemiskinan ekstrem) kita turun, tapi juga berpotensi naik apabila tahun depan misalnya gara-gara inflasi yang sedang melanda dunia saat ini, PPP itu bisa berubah dan bisa jadi angka kemiskinan ekstrem nasional kita meningkat lagi," jelasnya.

Ia menuturkan, ada 14 provinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan ekstrem yang tercatat di atas angka nasional. DIY dalam hal ini termasuk salah satunya. "Ke-14 pro-

vinci mengalami angka kemiskinan ekstrem di atas nasional dan sisanya di bawah angka nasional," ujar Pungky.

Dijelaskan, provinsi dengan perubahan angka kemiskinan ekstrem terendah yakni Bali yakni 0,54 persen. Sedangkan, angka kemiskinan ekstrem yang tertinggi tercatat di Papua sebesar 11 persen.

Sementara itu, lebih lanjut Pungky juga menjelaskan untuk angka kemiskinan nasional turun dari 9,73 persen menjadi 9,54 persen. Berdasarkan data BPS, katanya, juga banyak provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan.

Setidaknya, ada 30 provinsi di Indonesia yang angka kemiskinannya mengalami penurunan. Sedangkan, empat provinsi lainnya mengalami kenaikan. "Posisi DIY masih di atas angka kemiskinan nasional yaitu 11,34 persen," tambahnya.

Provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan tertinggi yakni Maluku. Pungky menjelaskan, angka kemiskinan di Maluku pada Maret 2021 hampir 17,9 persen dan Maret 2022 lalu hampir 16 persen.

"Provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi Sulawesi Barat, dari 11,29 persen di Maret tahun lalu dan Maret tahun ini menjadi 11,75 persen," ujar Pungky.

DPRD DIY sebelumnya juga mengatakan kemiskinan di DIY masih menjadi masalah terbesar. Hal ini disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY, Suparja dalam rapat kerja tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) belum lama ini.

"Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemda DIY perlu ditingkatkan, sebab banyak bantuan sosial yang tidak sesuai dengan sasarannya," kata Suparja.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih juga mengatakan, persentase penduduk miskin di DIY per Maret 2022 sebesar 11,34 persen. Namun, angka tersebut sudah menunjukkan penurunan sebesar 0,57 persen dari tahun sebelumnya.

"Persentase tersebut menunjukkan data sebanyak 454,76 ribu penduduk miskin yang ada di DIY pada Maret 2022," katanya. ■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005